CROSS-CUTTING

2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

CROSSCUTTING INTERNAL DPMPTSP PROV.SULAWESI TENGAH

PROGRAM/UNIT KERJA	JUMLAH INVESTOR BERSKALA NASIONAL	RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA	KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN	JUMLAH NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (SEKRETARIAT)				- Urusan penunjang operasional perkantoran; Kepegawaian; Program; Keuangan dan Asset
				- Fasilitasi Indeks Pelayanan Publik terhadap Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM (TIM DALAK)				- Pengawasan Penanaman Modal 13 Kabupaten/Kota; Inspeksi Lapangan Proyek PMDN di 2 Kabupaten Potensial; Monitoring Pelaporan LKPM; Fasilitasi Mediasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha; Bimbingan Teknis Pengisian LKPM
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PM (TIM DATA)	**- Pengelolaan Data Bidang Perizinan dan Bidang Penanaman Modal**	**- Pengelolaan Data Bidang Perizinan dan Bidang Penanaman Modal**	**- Pengelolaan Data Bidang Perizinan dan Bidang Penanaman Modal**	- Analisis Data Realisasi PMA dan PMDN; Analisis Data Perizinan Berusaha; Analisis Data Tematik
PROGRAM PELAYANAN PM (TIM PERIZINAN, TIM PENGAWASAN, TIM ADVOKASI)			- Fasilitasi pelayanan dan konsultasi perizinan; Workshop perizinan berbasis Risiko; Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan; Uji Publik Rancangan Pergub tentang Perubahan Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan	
			- Klinik pendampingan penerbitan NIB	

			- Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	
PROGRAM PROMOSI PM (TIM PROMOSI)	- Event Pameran investasi; Promosi Investasi Melalui Media Online; Penyusunan strategi promosi penanaman modal; Pembuatan Video Pendek Potensi Unggulan Daerah Sulawesi Tengah 2026			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PM (TIM PENGEMBANGAN IKLIM)		- Pelaksanaan Verifikasi dan Penilaian pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal; Monitoring ketersediaan regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal terhadap kabupaten/kota; Uji Publik PERGUB Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2025-2045; Monitoring progress ketersediaan dokumen RUPM Kabupaten/Kota; Identifikasi Potensi Sektor Unggulan Daerah dan Peluang Investasi di 13 Kab/Kota		
		- Kegiatan Klinik Berani Investasi Langsung		

CROSSCUTTING DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan

Klinik Berani Investasi Langsung

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PM

Kegiatan Klinik Berani Investasi Langsung; Pelaksanaan Verifikasi dan Penilaian pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal; Monitoring ketersediaan regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal terhadap kabupaten/kota; Uji Publik PERGUB Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2025-2045; Monitoring progress ketersediaan dokumen RUPM Kabupaten/Kota; Identifikasi Potensi Sektor Unggulan Daerah dan Peluang Investasi di 13 Kab/Kota
Rp. 225.999.550,-

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM

Pengawasan Penanaman Modal 13 Kabupaten/Kota; Inspeksi Lapangan Proyek PMDN di 2 Kabupaten Potensial; Monitoring Pelaporan LKPM; Fasilitasi Mediasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha; Bimbingan Teknis Pengisian LKPM
Rp. 173.979.650,-

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Urusan penunjang operasional perkantoran; Kepegawaian; Program; Keuangan dan Asset
Rp. 14.932.820.229,-

JUMLAH INVESTOR BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)

(2.770 PROYEK)

RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA

(52 ORANG/ PERUSAHAAN)

KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN

(4.610 MILYAR RUPIAH)

JUMLAH NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)

(140.100.000 JUTA RUPIAH)

PROGRAM PROMOSI PM

Event Pameran investasi; Promosi Investasi Melalui Media Online; Penyusunan strategi promosi penanaman modal; Pembuatan Video Pendek Potensi Unggulan Daerah Sulawesi Tengah 2026
Rp. 100.000.000,-

PROGRAM PELAYANAN PM

Fasilitasi pelayanan dan konsultasi perizinan; Klinik pendampingan penerbitan NIB; Workshop perizinan berbasis Risiko; Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan; Uji Publik Rancangan Pergub tentang Perubahan Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan
Rp. 337.208.750 ,-

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PM

Analisis Data Realisasi PMA dan PMDN; Analisis Data Perizinan Berusaha; Analisis Data Tematik
Rp. 60.000.000

Dalam Penyelesaian Permasalahan/Kendala Penanaman Modal, DPMPTSP berkoordinasi dan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait dalam hal Fasilitasi dan Mediasi Sengketa. Menjadi jembatan dialog terbuka antara pelaku usaha yang bermasalah dengan masyarakat atau instansi serta memberikan rekomendasi teknis dan pendampingan regulasi agar operasional investasi kembali berjalan lancar.
Pihak-pihak terkait dimaksud antara lain:
Tim Teknis (DKP, Disbunnak, Dinas ESDM, DLH, Dishut, Disperindag, Dishub, Cikasda, Bina Marga dan Tata Ruang, PUPR, Dinas Pertanian; Biro Ekonomi; Biro Hukum; Instansi Vertikal Teknis; Unsur Pemerintah Tingkat Lokal.

Dalam proses penerbitan izin usaha, DPMPTSP dibantu oleh OPD teknis terkait yang bertugas memberikan verifikasi, persyaratan dasar, dan pertimbangan teknis atas permohonan izin usaha yang diajukan.
Perangkat Daerah (Tim Teknis) terkait dimaksud antara lain:
DKP, Disbunnak, Dinas ESDM, DLH, Dishut, Disperindag, Dishub, Cikasda, Bina Marga dan Tata Ruang, PUPR, Dinas Pertanian.

MATRIKS CROSSCUTTING KINERJA BERBASIS SAKIP DPMPTSP

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Daerah	Sasaran DPMPTSP	Program DPMPTSP	Perangkat Daerah Pendukung	Kontribusi Pendukung
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi Yang Berkualitas	Program Pelayanan Penanaman Modal	- OPD Tim Teknis (DKP, Disbunnak, Dinas ESDM, DLH, Dishut, Disperindag, Dishub, Cikasda, Bina Marga dan Tata Ruang, PUPR, Dinas Pertanian)	Memverifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan dan Teknis, Melakukan Kajian dan Validasi Teknis, Membuat Rekomendasi, Menyebarkan Informasi
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- OPD Tim Teknis (DKP, Disbunnak, Dinas ESDM, DLH, Dishut, Disperindag, Dishub, Cikasda, Bina Marga dan Tata Ruang, PUPR, Dinas Pertanian) - Biro Hukum - Biro Ekonomi - ATR/BPN; Kementerian PU; Kementerian Lingkungan Hidup; dan Instansi Vertikal Lainnya Terkait Teknis - Unsur Pemerintah Tingkat Lokal	Membantu DPMPTSP dalam Fasilitasi dan Mediasi Sengketa. Menjadi jembatan dialog terbuka antara pelaku usaha yang bermasalah dengan masyarakat atau instansi serta memberikan rekomendasi teknis dan pendampingan regulasi agar operasional investasi kembali berjalan lancar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas (PPK) / Sekretaris Dinas
DEWIE KUNDAIN - MENGENGAH PELAK SEKRETARIS DAERAH
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Pagu:
(RP.0 - RIVIS/TAHUN)
Pagu Belanja
Pagu Pendapatan
Pagu Pembiayaan

Kepala Dinas (Pengguna Barang/Pengguna Anggaran)
Mengelola Nilai Investasi yang Berkualitas
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Jumlahnya/Pencarian Nilai Realisasi Pelaku (Miliar Rupiah)
Pagu Pendapatan
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas (Pengguna Barang/Pengguna Anggaran)
Mengelola Nilai Investasi yang Berkualitas
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
(Rata Dapa Dang Tempa Kerja Energi Pemodanan)
Pagu Pendapatan
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas (Pengguna Barang/Pengguna Anggaran)
Mengelola Nilai Investasi yang Berkualitas
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
(Jumlah Investasi berdasarkan realisasi PMDN/PMA (Triyun))
Pagu Pendapatan
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas (Pengguna Barang/Pengguna Anggaran)
Mengelola Kualitas Layanan Perizinan dan Nonperizinan
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
(Jumlah nilai investasi berdasarkan realisasi PMDN/PMA)
Pagu Pendapatan
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Kualitas Layanan Perizinan dan Nonperizinan
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
(Jumlah nilai investasi berdasarkan realisasi PMDN/PMA)
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Dinas (Sekretaris Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
Mengelola Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bersama Pemerintah Daerah
Pembina Utama Madya (IV/d) / Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Pagu Anggaran
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Crosscutting merupakan pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengintegrasikan kontribusi lintas unit organisasi dan lintas perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Tujuannya adalah mewujudkan keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja, meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memastikan setiap unit memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai Visi, Misi, tujuan, dan sasaran Perangkat Daerah.

Palu, 12 Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002